

BAB I

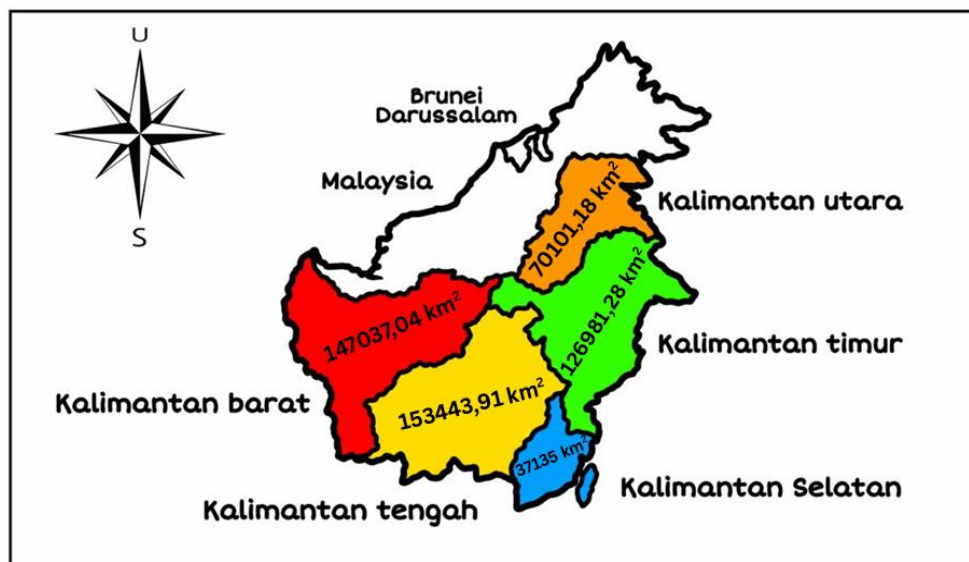
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan secara umum merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Secara lebih luas, kemiskinan juga mencakup keterbatasan dalam hal partisipasi sosial, akses terhadap informasi, serta kesempatan untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Seseorang dianggap miskin, apabila ekonomi yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makan melalui pengeluaran.

Kemiskinan menjadi permasalahan umum yang tersebar di seluruh negara, salah satunya adalah Indonesia. Masalah kemiskinan yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat melalui persentase penduduk miskin. Menurut Debrina (2018), persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,41 persen dari total penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia meningkat akibat dampak dari pandemi *COVID-19* menjadi sebesar 10,19 persen. Pemerintah terus berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hingga pada tahun 2024, angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang menjadi

8,57 persen. Kemiskinan ini tidak hanya terjadi di daerah tertentu tetapi menyebar di seluruh wilayah, salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan wilayah terluas nomor dua di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 748.168 km² berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS (2024). Berikut merupakan peta mengenai luas wilayah di Pulau Kalimantan yang disajikan pada Gambar 1.1.

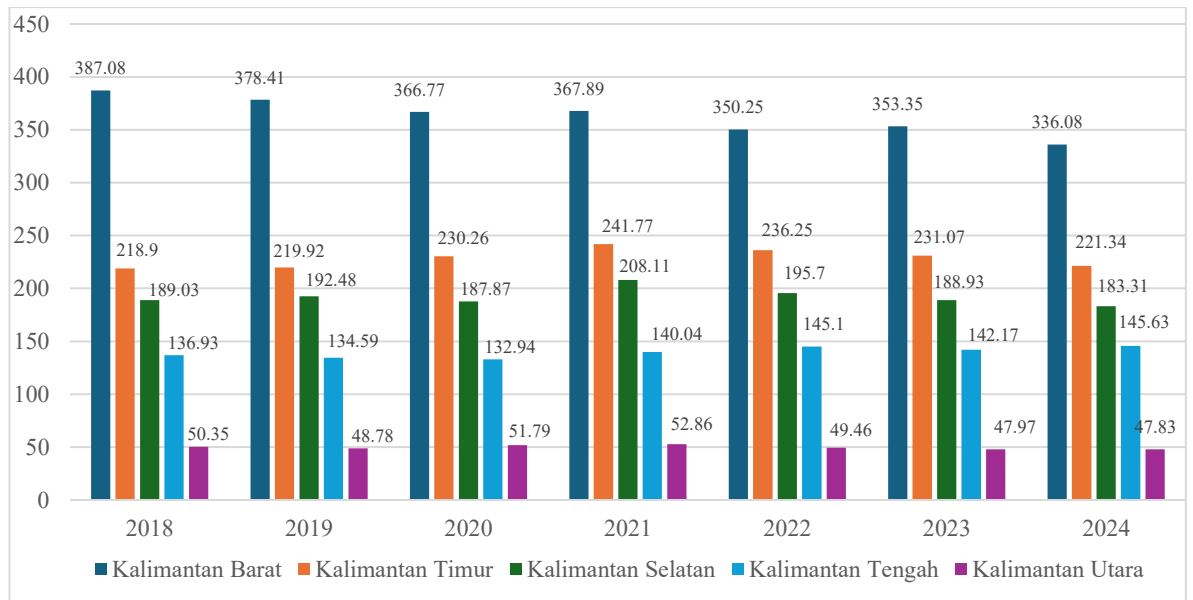


Sumber : Data diolah (2025)

Gambar 1.1
Peta Luas Wilayah di Pulau Kalimantan

Dengan luasnya wilayah Pulau Kalimantan dapat menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan. Banyak akses yang menjadi terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan antar kabupaten atau kota dan dapat melebar. Kondisi geografis yang sulit di jangkau dapat menghambat distribusi program – program yang telah ciptakan oleh pemerintah serta efektivitas intervensi terhadap pengentasan kemiskinan. Berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk

miskin di Pulau Kalimantan pada tahun 2018 hingga 2024, seperti yang disajikan dalam Gambar 1.2.



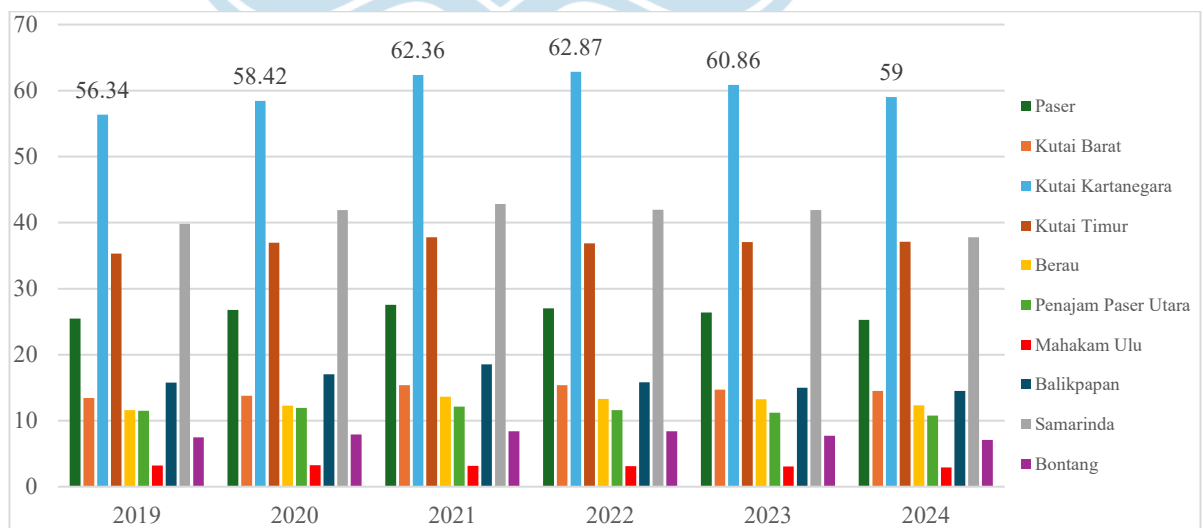
Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Kalimantan
Tahun 2018 – 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi dibandingkan Pulau Kalimantan yang lain, salah satunya pada tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan tahun lainnya sebanyak 387,08 ribu jiwa. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 241,77 ribu jiwa, yang selanjutnya disusul oleh Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 208,77 ribu jiwa, dan Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 145,63 ribu jiwa. Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi yang

memiliki tingkat kemiskinan paling rendah, salah satunya pada tahun 2024 sebanyak 47,83 ribu jiwa yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sebuah visi yang berbunyi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” menjadi tonggak awal mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berdasarkan Portal Kaltim (2025). Hal tersebut merupakan sebuah upaya menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru di Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan data BPS, Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin yang tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan yang lain. Berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 hingga 2024 seperti yang disajikan dalam Gambar 1.3.

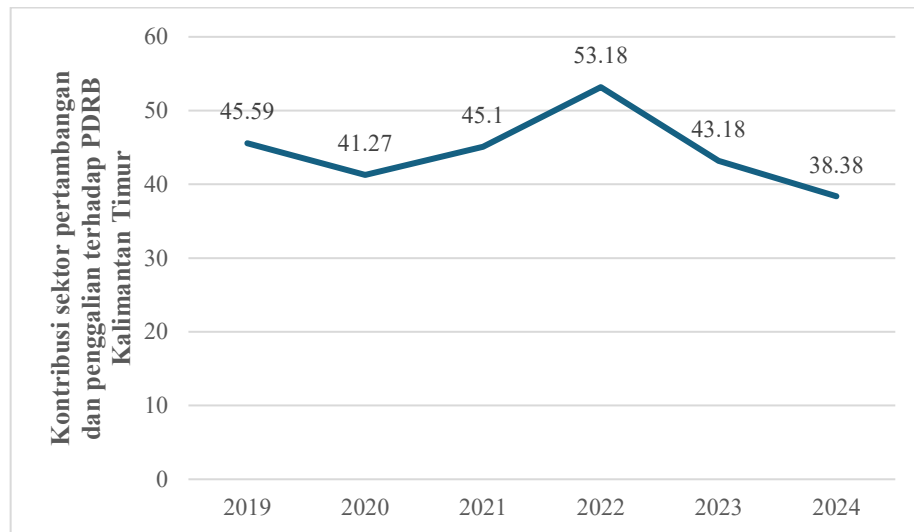


Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2025 (diolah)

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 – 2024

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki angka jumlah penduduk miskin paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lainnya, salah satunya pada tahun 2022 yaitu sebanyak 62,87 ribu jiwa. Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin paling rendah dibandingkan yang lainnya, salah satunya pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2,9 ribu jiwa karena Mahakam Ulu menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota yang lainnya. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kemiskinan dapat terjadi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor sumber daya alam.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan kepemilikan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang mendominasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah pertambangan dan penggalian, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Kepemilikan sumber daya alam yang tinggi ini, dapat menjadi peluang untuk Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan angka kemiskinan. Berikut merupakan perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2024 (persen), seperti yang disajikan dalam Gambar 1.4.



Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2025 (diolah).

Gambar 1.4
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2024 (persen)

Dari gambar di atas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2024 perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi. Meskipun memiliki angka yang besar, tetapi kontribusinya cenderung menurun. Kontribusi yang besar adalah pada tahun 2022 sebesar 53,18 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 43,18 persen dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 38,38 persen. Tentunya, hal ini dapat mempengaruhi finansial yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur melalui dana bagi hasil.

Keberadaan dana bagi hasil sangat erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, sebab menjadi ironis ketika terdapat daerah yang secara *de facto* memiliki banyak sumber daya alam tetapi juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi seperti yang dikatakan oleh Indah (2024) . Secara teoritis, dana bagi hasil merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan kepada setiap daerah dengan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil dengan pajak dan bukan pajak/SDA. Menurut Olivia (2020), adanya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah melalui aliran dana bagi hasil, secara aktual daerah dapat lebih berkembang dan memiliki modal untuk penggalan potensi melalui sektor sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berikut merupakan data mengenai Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Timur seperti yang disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2024

Tahun	DBH Bukan Pajak (juta rupiah)
2019	Rp 2.804.521
2020	Rp 2.856.593
2021	Rp 1.703.069
2022	Rp 5.605.709
2023	Rp 4.869.311
2024	Rp 9.946.322

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2025 (diolah).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dana bagi hasil bukan pajak Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2024, dengan peningkatan yang cukup signifikan di beberapa tahun tertentu. Menurut Zaini (2010), daerah penghasil sumber daya alam merasa bahwa dana bagi hasil yang diterima sangat kecil apabila dibandingkan dengan sumber daya alam yang dihasilkan. Meskipun demikian, dana bagi hasil yang kecil belum tentu dapat diserap semuanya oleh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, dana bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan yang drastis sebesar 40,38

persen akibat pandemi *COVID-19*, di mana seluruh aktivitas dihentikan dan membuat perekonomian tidak dapat meningkat. Pada tahun 2022, segala aktivitas telah berjalan dengan normal dan stabilitas ekonomi setelah pandemi *COVID-19*. Hal tersebut juga memungkinkan sektor pertambangan dan penggalan melalui pengelolaan sumber daya alam kembali beroperasi dengan kapasitas penuh serta meningkatkan kontribusi terhadap dana bagi hasil di Provinsi Kalimantan Timur meningkat secara signifikan pada tahun 2024. Menurut Agilita dan Fevriera (2024), salah satu faktor peningkatan dana bagi hasil bukan pajak yang sangat pesat karena proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah termasuk investasi di sektor konstruksi, properti, dan jasa pendukung. Menurut Wijaya (2021), penerimaan dana bagi hasil bukan pajak menjadi salah satu faktor yang cukup penting karena dalam membagikan dana tersebut lebih memprioritaskan daerah penghasil (*by origin*) yang dapat memberikan keuntungan (*privilege*) bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Melalui dana bagi hasil bukan pajak yang dimiliki, tentunya dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjalankan program menurunkan angka kemiskinan.

Dalam penelitian ini akan dianalisis peranan dana bagi hasil SDA dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Di samping itu, variabel lain yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan IPM. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari meningkatnya kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur. Meningkatnya IPM di Kalimantan Timur menunjukkan kualitas SDM di

Kalimantan Timur semakin meningkat. Kedua variabel ini juga mempunyai kontribusi penting bagi penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah yang tersusun pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan Sumber Daya Alam yang ditunjukkan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024?
2. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka terdapat tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan Sumber Daya Alam yang ditunjukkan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka terdapat manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi prioritas fokus lanjutan dan menciptakan solusi serta mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki agar mampu menurunkan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain agar lebih baik dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman pembaca mengenai dampak dari dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan.

1.5. Hipotesis

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan dan penelitian terdahulu serta teori yang ada, terdapat hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Diduga bahwa variabel kepemilikan Sumber Daya Alam yang ditunjukkan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024.

2. Diduga bahwa variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024.
3. Diduga bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2024.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan untuk penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini memaparkan teori berdasarkan bukti yang kuat untuk mendukung terkait dengan penelitian. Hal ini meliputi sumber daya alam, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia yang kaitannya dengan kemiskinan dan diukur dari persentase penduduk miskin.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini meliputi data dan sumber data, teknik analisis data, metode analisis, serta tahapan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memberikan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data dengan menggunakan model dan alat analisis yang telah diestimasi.

BAB V PENUTUP

Bab V merangkum kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan saran yang relevan terkait hasil penelitian ini.

